

PENERAPAN PROGRAM PENDIDIKAN BERBASIS KEUNGGULAN LOKAL DI SMK

Warman

Universitas Mulawarman, Kampus Gunung Kelua, Samarinda
E-mail: cahaya.warman@yahoo.com

Abstract: Educational Program Based on Local Potential at a Vocational School. This is a descriptive-qualitative study implementing an educational program based on local potential at Fisheries Study Programme. The study was carried out at Vocational School II, Bontang. The results show three main issues. First, the application of Educational Program Based on Local Wisdoms at the Fisheries Study Program at Vocational School II, Bontang already met the national educational standards, but not able to manage the natural resources of fisheries. Second, the problems surfacing include the lack of supporting facilities, the lack of interests in entrepreneurship and fishing industry among the alumni, and the unintensive coordination between educational providers and policy makers. Third, the planning for future improvements include completing the necessary infrastructure, maximizing the potential in cooperation with the industry, promoting fishery products at important events, improving the competence of the students, participating in local and national level competitions, fostering entrepreneurial spirit by giving entrepreneurship training to the teachers and the students, and organizing industrial practices outside of East Borneo.

Keywords: fisheries education programe, fishery industry, entrepreneurship, local potential

Abstrak: Penerapan Program Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal di SMK. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan penerapan dan hasil penyelenggaraan program Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal (PBKL) perikanan, mengetahui masalah yang dihadapi dalam menerapkan program PBKL perikanan, dan merencanakan perbaikan ke depan. Metode penelitian deskriptif, pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian di SMK Negeri 2 Bontang. Objek penelitian warga sekolah dan pengawas sekolah. Teknik pengumpulan data: observasi, wawancara, dokumentasi, dan *focus group discussion*. Analisis data: reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan (1) penerapan program PBKL perikanan di SMK Negeri 2 Bontang sudah memenuhi standar nasional pendidikan, namun hasilnya belum mampu mengelola potensi sumber daya alam perikanan; (2) masalah yang dihadapi: kurangnya fasilitas pendukung, minat alumni berwirausaha masih kurang, industri perikanan masih sangat kurang, para penyelenggara pendidikan dan para pembuat kebijakan belum berkoordinasi secara intensif; (3) rencana perbaikan ke depan: melengkapi sarana dan prasarana, memaksimalkan potensi, bekerjasama dengan dunia industri, mempromosikan hasil perikanan, meningkatkan kompetensi siswa, memupuk jiwa wirausaha, menyelenggarakan praktik industri ke luar Kalimantan Timur.

Kata kunci: program pendidikan, keunggulan lokal perikanan

Keunggulan lokal perikanan di Provinsi Kalimantan Timur termasuk di Kota Bontang cukup potensial, tetapi belum dikelola secara optimal. Nilai jual produksi perikanan tahun 2009 Rp4.331.270.686.000,00. Di sisi lain, kondisi masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah pesisir Provinsi Kalimantan Timur tergolong miskin. (BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2010).

Secara kelembagaan, pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk mengatasi permasalahan yang terjadi dalam masyarakat, dan salah satunya adalah melalui sektor pendidikan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah menetapkan visi pendidikan nasional dalam mewujudkan sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa un-

tuk memberdayakan semua warga negara Indonesia agar berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Untuk mewujudkan visi tersebut, misi Departemen Pendidikan Nasional antara lain adalah (1) mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia; (2) meningkatkan mutu pendidikan; (3) meningkatkan relevansi pendidikan dengan kebutuhan masyarakat dan tantangan global; (4) membantu dan memfasilitasi dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar; (5) meningkatkan kesiapan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral; (6) meningkatkan profesional berdasarkan standar yang bersifat nasional dan global; dan (7) mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia,” (Mulyasa, 2009:18-19). Selanjutnya, dalam Permendiknas No. 19/2005 dinyatakan bahwa Direktorat Pembinaan SMA mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, supervisi, dan evaluasi di bidang pembinaan sekolah menengah atas, maka salah satu program yang telah dilaksanakan sejak tahun 2007 adalah mengembangkan program PBKL.

Keunggulan lokal adalah segala sesuatu yang merupakan ciri khas kedaerahan yang mencakup aspek ekonomi, budaya, teknologi informasi dan komunikasi, ekologi, dan lain-lain. Keunggulan lokal adalah hasil bumi, kreasi seni, tradisi, budaya, pelayanan, jasa, sumber daya alam, sumber daya manusia atau lainnya yang menjadi keunggulan suatu daerah (Dedidwitagama, 2007). Keunggulan lokal harus dikembangkan dari potensi daerah, yaitu potensi sumber daya spesifik yang dimiliki suatu daerah. Sebagai contoh wilayah Provinsi Kalimantan Timur, memiliki potensi sumber daya alam perikanan. Oleh karena itu, pemerintah dan masyarakat wilayah Provinsi Kalimantan Timur dapat melakukan sejumlah upaya dan program, agar potensi tersebut dapat diangkat menjadi keunggulan lokal Kalimantan Timur sehingga ekonomi di wilayah provinsi dan sekitarnya dapat berkembang dengan baik.

Pembahasan keunggulan lokal juga terkait dengan filsafat *rekonstruktivisme*. menurut *Rekonstruktivisme* kita tidak pernah mengerti realitas yang sesungguhnya secara ontologis, yang kita mengerti adalah struktur konstruksi kita akan sesuatu objek Suryana: 2002. Dalam konteks ini realitas yang ada di sekeliling siswa sehari-hari, misalnya yang berupa potensi daerah yang menjadi keunggulan lokal, akan membantu mempercepat siswa untuk mengkonstruksi

pemikirannya menjadi suatu pengetahuan yang bermakna bagi dirinya. Potensi daerah atau keunggulan lokal adalah potensi yang kontekstual yang dapat diangkat sebagai bahan pembelajaran yang menarik di sekolah. Pandangan tersebut didukung oleh kebijakan pemerintah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Pasal 14 ayat 1-3 menjelaskan bahwa SMA dapat memasukkan pendidikan berbasis keunggulan lokal. Pendidikan berbasis keunggulan lokal dapat merupakan bagian dari pendidikan kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, pendidikan kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, pendidikan kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan kelompok mata pelajaran estetika, atau kelompok mata pelajaran pendidikan jasmani, olah raga, dan kesehatan.

PBKL SMK adalah pendidikan/program pembelajaran yang diselenggarakan pada satuan pendidikan sesuai dengan kebutuhan daerah, dengan memanfaatkan berbagai sumber daya dan potensi daerah yang bermanfaat dalam proses pengembangan kompetensi peserta didik. Sumberdaya dan potensi daerah dimaksud antara lain mencakup aspek sumberdaya alam, sumberdaya manusia, ekonomi, budaya/histori, bahasa, teknologi informasi dan komunikasi (TIK/ICT), ekologi dan lain-lain. Supriyanto (2011) mengatakan bahwa “Teori lain yang juga melandasi perlunya diterapkan pendidikan berbasis keunggulan lokal adalah teori *konstruktivisme*”. Teori *konstruktivisme* diyakini mampu mengkonstruksi berbagai realitas yang dialami para siswa saat mereka belajar sedemikian sehingga mereka mampu menangkap manfaat dari pelajaran yang mereka pelajari. Pada sisi inilah dalam pandangan teori *konstruktivisme* berbagai potensi keunggulan lokal dapat dijadikan materi pembelajaran.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang SNP dibentuk sebagai standar minimum sebagaimana pada UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas pasal 1 ayat 17, bahwa standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu.

Profil pendidikan berbasis keunggulan lokal (PBKL) mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang terdiri atas 8 komponen, yaitu standar isi, standar kompetensi lulusan, standar proses, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar

penilaian, dan standar pembiayaan. Dari kerangka dasar dan struktur kurikulum yang ditetapkan dalam SNP pada setiap kelompok mata pelajaran ditambah dengan kurikulum muatan lokal yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, potensi sumberdaya manusia maupun potensi sumber daya alamnya.

Di Provinsi Kalimantan Timur, SMK yang terdaftar pada tahun 2011 berjumlah 203 SMK, dan yang memiliki bidang keahlian yang relevan dengan keunggulan lokal perikanan sebanyak 10 SMK, termasuk SMK Negeri 2 Bontang (Profil SMK Kalimantan Timur, 2011). Tujuannya adalah untuk (1) menyediakan tenaga kerja terdidik di bidang perikanan; (2) menghasilkan lulusan yang mampu berwirausaha di bidang perikanan; (3) mengintegrasikan keunggulan lokal dalam pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif dan menyenangkan melalui penerapan berbagai model dan metode pembelajaran serta penggunaan media dan bahan ajar yang tepat. Sampai saat ini masih belum banyak dilakukan penelitian, baik tentang kebijakan maupun penerapan program pendidikan berbasis keunggulan lokal, baik dari segi *input*, proses, dan *output* berdasarkan SNP (8 standar), maupun kendala yang dihadapi.

Penelitian ini bertujuan (1) mendeskripsikan penerapan dan hasil penyelenggaraan program pendidikan berbasis keunggulan lokal perikanan; (2) mengetahui masalah yang dihadapi penyelenggara dalam melaksanakan program pendidikan berbasis keunggulan lokal perikanan; (3) upaya merencanakan perbaikan ke depan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Rancangan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi satu kasus. Orientasi pendekatan penelitian yang dipergunakan adalah kualitatif, karena dengan pendekatan ini peneliti dapat memahami secara empirik tentang konsep-konsep, visi, misi, pandangan-pandangan, nilai, kebiasaan, ide-ide, dan keyakinan yang membudaya di SMK yang diteliti sehingga tidak terjadi salah penafsiran atau pemaknaan terhadap obyek yang diteliti. Penelitian dilakukan sampai pada tingkat keyakinan dan kejenuhan data, dan selama proses itu pula dilakukan kategorisasi sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan penelitian untuk membuat suatu konsepsi tentang program PBKL.

Penelitian dilakukan di SMK Negeri 2 Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, dengan sumber data semua warga sekolah, pengawas sekolah, orang tua siswa, dan dewan sekolah yang telah mendapat rekomendasi dari sekolah. Sumber data lainnya berupa dokumen yang relevan dengan fokus penelitian,

seperti gambar, foto, gedung, lingkungan, catatan rapat atau dokumen yang berkaitan dengan fokus penelitian termasuk profil sekolah dan evaluasi diri sekolah.

Teknik pengumpulan data: observasi, wawancara, dokumentasi, dan *focus group discussion* (FGD). Analisis data pada kasus individual menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman, yaitu (1) reduksi data, (2) display data, dan (3) penarikan kesimpulan/ verifikasi. Untuk pengujian validitas data, peneliti berpegang pada prinsip: *credibility*, *dependability*, *confirmability*, dan *transferability*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Berdasarkan hasil analisis didapatkan temuan penelitian sebagai berikut. **Pertama**, penerapan program PBKL perikanan di SMK Negeri 2 Bontang secara umum sudah memenuhi standar nasional pendidikan (seperti: standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana), meskipun masih memerlukan pengembangan.

Pada standar isi, pengembangan kurikulum pada tingkat satuan pendidikan telah melibatkan pengawas sekolah, kepala sekolah, pendidik, tenaga kependidikan, dan komite sekolah, dengan berpedoman pada Panduan Penyusunan Kurikulum dari BNSP. Dokumen kurikulum disusun setiap 2 tahun sekali, dan disahkan oleh Dinas Pendidikan sebelum diberlakukan. Silabus dan RPP tersedia untuk semua mata pelajaran, tetapi sekolah belum melakukan revisi kurikulum secara berkala, dan kinerja Tim Pengembang Kurikulum belum optimal. Kurikulum dikembangkan berdasarkan 7 prinsip pengembangan kurikulum, yaitu (a) memuat tiga kelompok mata pelajaran (normatif, adaptif, dan produktif); (b) memuat muatan lokal yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah, yaitu Pendidikan lingkungan hidup dan bahasa Jepang; (c) diselenggarakan dalam bentuk pendidikan sistem ganda; (d) alokasi waktu satu jam pelajaran tatap muka 45 menit; (e) beban belajar meliputi kegiatan tatap muka, praktik di sekolah, dan kerja praktik di dunia usaha/industri ekuivalen dengan 36 sampai 44 jam pelajaran per minggu; (f) minggu efektif 40 minggu; dan (g) lama pendidikan 3 tahun, tetapi sekolah belum pernah melakukan pengkajian karakteristik daerah.

Pada standar proses, silabus sudah dikembangkan berdasarkan standar isi (SI), standar kompetensi lulusan (SKL), dan panduan KTSP, tetapi belum dipastikan apakah semua silabus sudah sesuai dengan

kurikulum spektrum 2010. Pengembangan silabus dilakukan guru secara mandiri dan berkelompok oleh guru, tapi belum menghasilkan produk konkret atas pengembangan yang telah dilakukan. Rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) disusun berdasarkan prinsip-prinsip perencanaan pembelajaran untuk setiap kompetensi dasar, tetapi belum diadakan penelaahan secara berkala untuk memastikan dampaknya pada hasil belajar peserta didik. Siswa dapat mengakses buku panduan, buku pengayaan, buku referensi, dan sumber belajar lain selain buku pelajaran dengan mudah. Sekolah sudah memiliki jaringan internet, tetapi komputer yang tersedia di lab belum mencukupi 1 siswa 1 komputer dan belum ada jaringan internet untuk setiap komputer yang terpasang di laboratorium komputer. Sekolah belum dapat memenuhi kebutuhan buku referensi guru secara optimal dan belum memiliki data base buku-buku referensi guru yang diperbaharui secara rutin. Sebagian guru belum dapat melaksanakan pembelajaran yang interaktif, inspiratif, menyenangkan dan menantang karena keterbatasan sarana dan prasarana. Peserta didik memperoleh kesempatan yang sama untuk melakukan eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi tetapi belum semua peserta didik melakukan seperti yang diharapkan guru. Proses pembelajaran disupervisi dan dievaluasi, tetapi hanya dilakukan pada setiap tahapan tertentu saja dan hanya dilakukan oleh pengawas sekolah.

Pada standar kompetensi lulusan, dari tahun 2008 sampai 2011 mengalami peningkatan, tetapi prestasi belajar siswa belum konsisten. Kemajuan peserta didik dapat terlihat dari nilai rapor mulai dari semester satu hingga semester enam, dan dari lomba akademis yang diikuti, namun yang mengikuti pelatihan dan lomba akademik masih kurang. Sarana untuk mengembangkan kreatifitas peserta didik masih kurang. Program bimbingan/konseling pribadi, sosial, belajar dan karier oleh guru BK belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh peserta didik, dan kedisiplinan peserta didik masih perlu ditingkatkan. Peserta didik menghasilkan berbagai karya seni yang nilainya dapat dilihat dari rapor dari semester satu hingga semester enam, disisi lain sekolah belum optimal memfasilitasi program kewirausahaan. Peserta didik mengikuti pelajaran agama dan pengembangan diri, sejak semester satu sampai dengan semester enam, dan sekolah memberikan piagam dan piala kepada siswa yang berprestasi.

Pada standar pendidik dan tenaga kependidikan, pendidik mengajar sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Sekolah dipimpin oleh seorang kepala sekolah, jumlah guru 48 orang: guru mata pelajaran normatif/adaptif yang dibutuhkan 23 orang tersedia 27 orang, guru mata pelajaran produktif dibutuhkan

20 orang tersedia 21 orang pembagian tugas sesuai kompetensinya, yaitu Nautika Kapal Penangkap Ikan (NKPI) 7 orang, Teknik Kapal Penangkap Ikan (TKPI) 3 orang, Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan (TPHPi) 4 orang, dan Agribisnis Perikanan 7 orang. Sekolah memiliki tenaga kependidikan tata usaha 4 orang, perpustakaan 1 orang, satpam 1 orang, *cleaning service* 1 orang, dan penjaga sekolah 1 orang, tetapi sekolah belum memiliki tenaga kependidikan sebagai teknisi. Latar belakang kepala sekolah sarjana (S1) Pendidikan Bidang Studi Kimia dan telah bersertifikasi guru. Kualifikasi pendidikan guru, berijazah S-1 46 orang dan S-2 2 orang. Jumlah guru kependidikan 5 orang dan guru non kependidikan 23 orang. Jumlah guru mata pelajaran normatif/adaptif yang berijazah S-1 26 orang dan S-2 1 orang. Jumlah guru berlatar belakang sarjana kependidikan 23 orang, dan non kependidikan 4 orang. Jumlah guru produktif berijazah S-1 20 orang dan S-2 non kependidikan 1 orang. Jumlah guru produktif yang telah memiliki Akta Mengajar 17 orang, dan memiliki Sertifikat Guru 14 orang. Guru produktif 4 orang belum memiliki Akta Mengajar. Kualifikasi tenaga kependidikan untuk tata usaha S-1 2 orang, D-3 1 orang, SMK 1 orang, satpam SMA 1 orang, *cleaning service* SMK 1 orang, dan penjaga sekolah SMP 1 orang. Kompetensi pendidik untuk beberapa guru telah mengikuti berbagai diklat atau pelatihan yang sesuai kompetensi dan mata pelajaran yang diampunya, baik untuk tingkat kota, provinsi, maupun nasional. Guru produktif yang memiliki latar belakang pendidikan yang tidak sesuai dengan mata pelajaran yang diampu, telah mengikuti pelatihan dan diklat alih profesi, tetapi belum seluruhnya guru mengikuti diklat yang sesuai dengan kompetensinya. Kompetensi tenaga kependidikan telah memiliki kompetensi yang memadai sesuai dengan tugas masing-masing, tetapi masih jarang diikutsertakan dalam pelatihan yang menunjang kompetensinya.

Pada standar sarana dan prasarana, ruang belajar dan ventilasi cukup untuk semua ruang belajar, tetapi sekolah masih membutuhkan ruang bengkel dan mesin kapal, bangunan sarana penunjang lainnya perlu ditambah (seperti aula, ruang guru, dan perpustakaan). SMK Negeri 2 Bontang memiliki 12 rombongan belajar (Rombel), 4 jurusan, jumlah siswa 336 siswa, yaitu jurusan NKPI kelas 1, 2, 3 = 73 siswa, jurusan TKPI kelas 1, 2, 3 = 88 siswa, jurusan AP kelas 1, 2, 3 = 87 siswa, dan jurusan TPHPi kelas 1, 2, 3 = 88 siswa. Jumlah peserta didik berkurang karena pindah ke sekolah lain dengan alasan tidak sesuai jurusan atau tidak bisa menyesuaikan diri dalam hal penerapan disiplin. SMK Negeri 2 Bontang memiliki sarana perpustakaan dan sumber belajar, tetapi belum stan-

dar. Ketersediaan buku belum mencukupi kebutuhan siswanya, terutama buku paket normatif adaptif tidak sesuai dengan jumlah siswa. SMK Negeri 2 Bontang telah melakukan perawatan terhadap bangunan, namun belum dilakukan perawatan secara berkala. Perawatan hanya difokuskan pada kolam dan sarana penunjang lainnya, dan tidak memiliki bangunan yang khusus untuk berkebutuhan yang khusus.

Hasil penyelenggaraan program pendidikan berbasis keunggulan lokal perikanan di SMK Negeri 2 Bontang peserta didik memperlihatkan kemajuan yang lebih baik dalam mencapai target yang ditetapkan standar kelulusan (SKL), namun tidak konsisten.

Tabel 1. Rata-rata Nilai Hasil Ujian Nasional SMK Negeri 2 Bontang Tahun Pelajaran 2010 - 2012

Tahun Pelajaran	Bahasa Indonesia	Matematika	Bahasa Inggris	Produktif
2009/2010	6,31	7,07	6,48	6,29
2010/2011	6,30	6,93	7,65	8,53
2011/2012	7,08	8,12	8,08	7,72

Sumber: Profil SMK Negeri 2 Bontang, 2012

Dari segi keterampilan, peserta didik yang sudah lulus belum mampu mengelola potensi sumber daya alam perikanan yang cukup potensial karena sekolah belum optimal dalam memfasilitasi program kewirausahaan untuk peserta didik.

Kedua, masalah yang dihadapi oleh penyelenggara dalam melaksanakan program pendidikan berbasis keunggulan lokal perikanan di SMK Negeri 2 Bontang adalah sebagai berikut. (a) Penguasaan kompetensi pedagogik untuk beberapa guru masih rendah; (b) Masih ada guru yang enggan memanfaatkan TIK. (c) Kurangnya minat guru untuk melakukan penelitian tindakan kelas (PTK). (d) Kurangnya fasilitas pendukung, seperti alat peraga, peralatan praktikum, tempat praktek kerja industri, bahan praktik belum memadai, dan kurangnya ruang belajar. (e) Dukungan dari pemerintah belum optimal. (f) Minat untuk masuk ke sekolah jurusan perikanan masih kurang karena sektor perikanan dianggap kurang prospektif, dan secara finansial hasil dari perikanan dianggap lebih rendah bila dibandingkan dengan sektor industri lain. (g) Minat alumni untuk berwirausaha masih kurang karena ketergantungan dengan adanya *rekrutmen* dari industri migas atau tambang. (h) Industri perikanan yang diharapkan dapat menyerap tenaga kerja madya dari SMK jurusan perikanan masih sangat kurang atau tidak ada. Di sisi lain, SMK yang berbasis industri banyak perusahaan yang siap menyerap tena-

ga kerja madyanya, dengan standar gaji (seperti industri kimia, LNG, pupuk Kaltim, batu bara, bahan peledak, dan sejenisnya) yang jauh lebih tinggi dari pada industri perikanan, sehingga animo peserta didik dan masyarakat lebih cenderung menyekolahkan anaknya ke SMK yang berbasis industri. (i) Lokasi/lahan perikanan yang luas dan potensial masih belum dikelola secara optimal. Disisi lain, para penyelenggara pendidikan dan para pembuat kebijakan yang lain belum melakukan koordinasi secara intensif untuk merespon dan mengelola potensi sumber daya alam perikanan tersebut.

Upaya yang sudah dilakukan penyelenggara sekolah dalam mengatasi masalah tersebut antara lain (a) meminta bantuan ke Dinas Pendidikan tentang fasilitas pendukung, seperti alat peraga, peralatan praktikum, bahan praktik, ruang belajar, menjalin kerjasama dengan dunia usaha di luar sekolah, mengirim anak ke pelabuhan yang sesuai dengan persyaratan dan melibatkan kepada komite sekolah untuk masalah biayanya; (b) melakukan sosialisasi dan pendekatan secara terus menerus kepada siswa dan orang tua siswa mengenai prospek usaha bidang perikanan ke depan; dan (c) memotivasi siswa untuk mengembangkan minat wirausaha.

Ketiga, upaya yang dapat dilakukan penyelenggara dalam merencanakan perbaikan ke depan untuk meningkatkan mutu pendidikan adalah sebagai berikut. (a) Sekolah menyusun program prioritas guna peningkatan profesionalisme guru secara berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan. (b) Sekolah melakukan kegiatan berkolaboratif antara guru dengan guru lainnya yang serumpun, atau dengan para mahasiswa yang melakukan penyusunan tugas akhir PTK guna pembudayaan mencintai penelitian tindakan kelas bagi para guru. (c) Sekolah menganggarkan ke dalam RKAS agar aktivitas penelitian guru melalui PTK mendapatkan bantuan operasional penelitian sebagai insentif. (d) Sekolah melengkapi sarana dan prasarana yang dibutuhkan, memaksimalkan potensi yang ada atau yang dimiliki, memperbanyak kegiatan serta melengkapi fasilitas praktik, memfasilitasi semua keperluan yang ada. (e) Sekolah mendorong pihak pemerintah untuk mengembangkan industri di bidang perikanan, bekerja sama dengan dunia industri yang berada di dalam maupun di luar wilayah Provinsi Kalimantan Timur, menggalang kerja sama dengan instansi terkait seperti Dinas Pendidikan, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Tenaga Kerja, serta Badan Perencanaan Daerah, pendekatan dengan *Out Sourshing* melalui Dana *Social Responsibility*. (f) Sekolah mempromosikan hasil perikanan pada even-even penting, dan selalu dipa-

merkan melalui Bursa Bazar, meningkatkan kompetensi siswa dengan menyiapkan sarana penunjang, meningkatkan kompetensi guru mata diklat, mengusulkan pengangkatan guru honor menjadi PNS, mengikuti perlombaan baik tingkat lokal maupun nasional, berbagi informasi kepada sekolah yang baru merintis program PBKL perikanan, bekerjasama dengan pemerintah setempat atau badan lain yang berpengalaman dalam mempraktekan ilmu bidang perikanan, berusaha menarik investor untuk berusaha di bidang perikanan. (g) Sekolah memupuk jiwa wirausaha yang dimulai dari kelompok kecil hingga siswa mau mencoba dan berusaha mandiri, melalui pemberian pelatihan kepada guru dan siswa tentang kewirausahaan, melibatkan siswa dalam setiap diklat bidang perikanan, menyelenggarakan praktek industri ke luar Kalimantan Timur sekaligus studi banding di industri perikanan, dengan tujuan untuk menumbuhkan minat bekerja dan berwirausaha di bidang perikanan.

Pembahasan

Pembahasan terhadap hasil analisis penerapan program pendidikan berbasis keunggulan lokal perikanan di SMK Negeri 2 Bontang, dilakukan berpedoman pada Permendiknas Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP) pada komponen Evaluasi Diri Sekolah (EDS). Pramudjono (2010) menjelaskan beberapa butir penting instrumen, antara lain (a) instrumen EDS mengacu pada SPM dan SNP; (b) instrumen EDS mencakup beberapa pertanyaan pokok pada setiap standar yang terkait dengan SPM dan SNP; (c) dalam EDS, setiap standar dibagi dalam beberapa komponen; (d) pada setiap komponen pada pertanyaan di tiap standar ada beberapa spesifikasinya; (e) pada setiap aspek dari setiap standar terdiri dari 4 tingkatan pencapaian, tingkat 1 berarti kurang, tingkat 2 sedang, tingkat 3 baik, tingkat 4 amat baik, dan (f) pada tiap tingkat pencapaian terdapat beberapa indikator yang sesuai dengan tingkat pencapaian tersebut. Tingkat 2 sama dengan telah memenuhi kriteria SPM.

Berdasarkan Permendiknas Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP) pada komponen Evaluasi Diri Sekolah (EDS), pada butir (e), penerapan program pendidikan berbasis keunggulan lokal perikanan di SMK Negeri 2 Bontang pada standar isi indikator 1.1.1 untuk pengembangan kurikulum pada tingkat satuan pendidikan tergolong sedang, berarti telah memenuhi kriteria SPM, indikator 1.1.2 tergolong baik, berarti telah memenuhi kriteria SPM, indikator 1.1.3 tergolong

baik, indikator 1.2.1 tergolong baik, dan pada indikator 1.2.2 tergolong baik. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa secara umum penerapan program pendidikan berbasis keunggulan lokal perikanan di SMK Negeri 2 Bontang pada standar isi telah memenuhi kriteria SPM. Namun pada indikator 1.1.1 untuk pengembangan kurikulum pada tingkat satuan pendidikan tergolong sedang. Artinya, sekolah harus berupaya untuk meningkatkan SPMP menjadi lebih baik. PP Nomor 19 Tahun 2005 pasal 13 ayat 1-3 menegaskan antara lain: (1) kurikulum untuk SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat dapat memasukkan pendidikan kecakapan hidup; (2) pendidikan kecakapan hidup dapat merupakan bagian dari pendidikan kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, pendidikan kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, pendidikan kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi, kelompok mata pelajaran pendidikan estetika, atau kelompok mata pelajaran pendidikan jasmani, olah raga, dan kesehatan. Dengan memasukkan pendidikan kecakapan hidup, maka proses pendidikan akan mengarah pada pengutamakan keunggulan lokal yang ada di masyarakat sekitar dan alam sekitar sebagaimana PP Nomor 19 Tahun 2005 pasal 14 dan 17, bahwa keunggulan lokal dapat merupakan bagian dari pendidikan kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, pendidikan kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, pendidikan kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan kelompok mata pelajaran estetika, atau kelompok mata pelajaran pendidikan jasmani, olah raga, dan kesehatan, yang dikembangkan sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah/karakteristik daerah, sosial budaya masyarakat setempat, dan peserta didik.

Pada standar proses, indikator 2.1.1 tergolong baik, indikator 2.1.2 tergolong kurang, yang berarti belum memenuhi kriteria SPM, indikator 2.2.1 tergolong baik, indikator 2.2.2 tergolong kurang, indikator 2.3.1 tergolong sedang, yang berarti telah memenuhi kriteria SPM, indikator 2.3.2 tergolong sangat baik, yang berarti telah memenuhi kriteria SPM, indikator 2.4.1 tergolong baik, indikator 2.4.2 tergolong baik, indikator 2.5.1 tergolong sedang, dan indikator 2.5.2 tergolong kurang. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa secara umum penerapan program pendidikan berbasis keunggulan lokal perikanan pada standar proses tergolong baik atau telah memenuhi kriteria SPM. Akan tetapi, pada indikator 2.1.2, indikator 2.2.2, dan indikator 2.5.2 masih tergolong kurang baik atau masih belum memenuhi kriteria SPM. Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspi-

tif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Pendidik dalam proses pembelajaran harus memberikan keteladanan (PP Nomor 9 Tahun 2005 pasal 19 ayat 1). Setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien (pasal 19 ayat 3). Perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar (pasal 20). Pelaksanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) harus memperhatikan jumlah maksimal peserta didik per kelas dan beban mengajar maksimal per pendidik, rasio maksimal buku teks pelajaran setiap peserta didik, dan rasio maksimal jumlah peserta didik setiap pendidik (pasal 21 ayat 1). Penilaian hasil pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menggunakan berbagai teknik penilaian sesuai dengan kompetensi dasar yang harus dikuasai (pasal 22 ayat 1). Pengawasan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan pengambilan langkah tindak lanjut yang diperlukan (pasal 23).

Pada standar kompetensi lulusan, indikator 3.1.1 tergolong sedang, yang berarti telah memenuhi kriteria SPM, indikator 3.1.2 tergolong sedang, indikator 3.1.3 tergolong sedang, indikator 3.2.1 tergolong sedang, indikator 3.2.2 tergolong baik, yang berarti telah memenuhi kriteria SPM, dan pada indikator 3.2.3 tergolong baik. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa secara umum penerapan program pendidikan berbasis keunggulan lokal perikanan pada standar kompetensi lulusan tergolong sedang atau telah memenuhi kriteria SPM. Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan (PP Nomor 19 Tahun 2005 pasal 25 ayat 1). Standar kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kompetensi untuk seluruh mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran dan mata kuliah atau kelompok mata kuliah (pasal 25 ayat 2). Kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan (pasal 25 ayat 4).

Standar kompetensi lulusan pada satuan pendidikan menengah kejuruan bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, ahklak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruan-nya (pasal 26 ayat 3).

Pada standar pendidik dan tenaga kependidikan, indikator 4.1.1 tergolong baik, yang berarti telah memenuhi kriteria SPM, indikator 4.1.2 tergolong baik, indikator 4.2.1 tergolong baik, indikator 4.2.2 tergolong baik, indikator 4.3.1 tergolong baik, dan pada indikator 4.3.2 tergolong baik. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa secara umum penerapan program pendidikan berbasis keunggulan lokal perikanan di SMK Negeri 2 Bontang pada standar pendidik dan tenaga kependidikan tergolong baik atau telah memenuhi kriteria SPM. Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional (PP Nomor 19 Tahun 2005 pasal 28 ayat 1). Pendidik pada SMA/MA atau bentuk lain yang sederajat memiliki (a) kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1); (b) latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan; dan (c) sertifikat profesi guru untuk SMA/MA (pasal 29 ayat 4). Pendidik pada SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat dan SMA/MA atau bentuk lain yang sederajat terdiri atas guru mata pelajaran yang penugasannya ditetapkan oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan keperluan (pasal 30 ayat 4). Tenaga kependidikan pada SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat dan SMA/MA, atau bentuk lain yang sederajat sekurang-kurangnya terdiri atas kepala sekolah/madrasah, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, dan tenaga kebersihan sekolah/madrasah. (pasal 35 ayat 1 butir c).

Pada standar sarana dan prasarana, indikator 5.1.1 tergolong baik, yang berarti telah memenuhi kriteria SPM, indikator 5.1.2 tergolong kurang, yang berarti belum memenuhi kriteria SPM, indikator 5.1.3 tergolong kurang, indikator 5.2.1 tergolong kurang, dan pada indikator 5.2.2 tergolong kurang. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa secara umum penerapan program pendidikan berbasis keunggulan lokal perikanan di SMK Negeri 2 Bontang pada standar sarana dan prasarana tergolong kurang atau belum memenuhi kriteria SPM. Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis

pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan (PP Nomor 19 Tahun 2005 pasal 42 ayat 1). Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan (pasal 42 ayat 2). Standar keragaman jenis peralatan laboratorium ilmu pengetahuan alam (IPA), laboratorium bahasa, laboratorium komputer, dan peralatan pembelajaran lain pada satuan pendidikan dinyatakan dalam daftar yang berisi jenis minimal peralatan yang harus tersedia (pasal 43 ayat 1). Standar jumlah buku teks pelajaran di perpustakaan dinyatakan dalam rasio minimal jumlah buku teks pelajaran untuk masing-masing mata pelajaran di perpustakaan satuan pendidikan untuk setiap peserta didik (pasal 43 ayat 4).

Hasil penyelenggaraan program pendidikan berbasis keunggulan lokal perikanan di SMK Negeri 2 Bontang dari aspek kognitif sudah cukup baik, tetapi dari aspek keterampilan masih sangat kurang. Oleh karena itu, perlu mendapatkan penanganan secepatnya. Hal ini senada dengan berbagai analisis yang menunjukkan bahwa 'pendidikan nasional dewasa ini sedang dihadapkan pada berbagai krisis yang perlu mendapatkan penanganan secepatnya, diantaranya berkaitan dengan masalah relevansi, atau kesesuaian antara pendidikan dengan kebutuhan masyarakat dan pembangunan' (Mulyasa, 2003:19). Demikian juga yang dikemukakan oleh Vebrianto (2011:2) yang mengatakan bahwa fenomena yang terjadi, antara dunia pendidikan dan perkembangan masyarakat tidak relevan. Kebutuhan masyarakat belum bisa diwujudkan sepenuhnya oleh lembaga pendidikan. Di antara indikator masalah ini adalah lulusan lembaga pendidikan belum siap pakai karena hanya menguasai teori dan miskin keterampilan, materi pendidikan tidak sesuai potensi daerah siswa bertempat tinggal. Materi pelajaran dan konteks kehidupan siswa pun tidak ada kesesuaian sehingga transformasi pendidikan dalam kehidupan siswa mengalami bias tujuan (utopis). Hal ini diperkuat dengan hasil penelitian Suryadi, (2010) yang menghasilkan temuan: pendidikan di SMA masih menghadapi masalah dalam kaitan dengan relevansi kurikulum, pembelajaran, dan manajemen sekolah yang menciptakan proses belajar siswa yang mutunya rendah (*rote learning*).

Program pendidikan kejuruan di sekolah kaku dan tidak lentur terhadap perubahan kebutuhan lapangan kerja.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut. Pertama, penerapan program PBKL perikanan di SMK Negeri 2 Bontang sebagian besar dari SNP sudah terpenuhi, namun lulusan yang dihasilkan belum mampu mengelola potensi sumber daya alam perikanan di daerah setempat. Pada standar isi, pengembangan kurikulum pada tingkat satuan pendidikan telah melibatkan pengawas sekolah, kepala sekolah, pendidik, tenaga kependidikan, dan komite sekolah, dengan berpedoman pada panduan penyusunan kurikulum dari BNSP. Pada standar proses, silabus sudah dikembangkan berdasarkan standar isi (SI), standar kompetensi lulusan (SKL), dan panduan KTSP. Pada standar kompetensi lulusan, dari tahun 2008 sampai 2011 mengalami peningkatan, tetapi prestasi belajar siswa belum konsisten atau masih naik dan turun. Pada standar pendidik dan tenaga kependidikan, sekolah dipimpin oleh seorang kepala sekolah, 48 guru, dan 8 orang tenaga kependidikan. Pada standar sarana dan prasarana, ruang belajar dan ventilasi cukup untuk semua ruang belajar, tetapi sekolah masih membutuhkan ruang bengkel dan mesin kapal, bangunan sarana penunjang lainnya perlu ditambah (seperti aula, ruang guru, dan perpustakaan).

Kedua, masalah yang dihadapi penyelenggara dalam melaksanakan program PBKL perikanan antara lain sebagai berikut. (1) Masalah pendidik, penguasaan kompetensi pedagogik untuk beberapa guru masih rendah, masih ada guru yang enggan memanfaatkan TIK, minat guru untuk melakukan PTK masih rendah. (2) Masalah sarana dan prasarana, kurangnya fasilitas pendukung KBM, seperti alat peraga, peralatan praktikum, tempat praktek kerja industri, bahan praktik, dan ruang belajar. (3) Masalah eksternal, dukungan pemerintah belum optimal, minat masuk ke SMK perikanan masih kurang, minat alumni berwirausaha masih kurang, industri perikanan masih sangat kurang atau tidak ada, para penyelenggara pendidikan dan para pembuat kebijakan belum melakukan koordinasi secara intensif untuk merespon potensi sumber daya alam perikanan. Upaya yang sudah dilakukan oleh sekolah antara lain menjalin kerjasama dengan dunia usaha, mengirim anak ke pelabuhan kerja sesuai persyaratan, sosialisasi secara terus menerus, memotivasi siswa untuk berwirausaha.

Ketiga, upaya merencanakan perbaikan ke depan terkait dengan hal berikut. (1) Prioritas program

peningkatan profesionalisme guru secara berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan, penelitian tindakan kelas dapat dilakukan dengan cara berkolaborasi antar guru yang serumpun, atau dengan mahasiswa yang sedang menyusun tugas akhir PTK, menganggarkan ke dalam RKAS bantuan penelitian guru sebagai insentif. (2) Masalah sarana dan prasarana (melengkapi sapsras yang dibutuhkan, memaksimalkan potensi yang dimiliki. (3) Memohon

pihak pemerintah untuk mengembangkan industri perikanan, bekerjasama dengan dunia industri, mempromosikan hasil perikanan pada even-even penting, meningkatkan kompetensi siswa, mengikuti perlombaan tingkat lokal dan nasional, memupuk jiwa wirausaha dengan pemberian pelatihan kewirausahaan kepada guru dan siswa, menyelenggarakan praktek industri ke luar Kalimantan Timur.

DAFTAR RUJUKAN

- Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur. 2010. *Kondisi Sosial Ekonomi dan Indikator Penting Kalimantan*. Samarinda: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur. 2010a. *Kalimantan Timur dalam Angka 2010*. Samarinda: Badan Pusat Statistik.
- Dedidwitagama. 2007. *Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal & Global*. (online). (<http://dedidwitagama.wordpress.com/2007/11/07/pendidikan-berbasis-keunggulan-lokal-global/>), diakses 6 Pebruari 2012.
- Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur. 2011. *Profil Sekolah Menengah Kejuruan Kalimantan Timur*. Samarinda: Dikmenjur Prop. Kaltim.
- Mulyasa, H.E. 2009. *Kurikulum Yang Disempurnakan*. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP)*. 2005. Jakarta: Depdiknas.
- Pramudjono. 2010. *Analisis Evaluasi Diri Sekolah*. Samarinda: Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur.
- Sudibyo, B. 2009a. *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan*. Jakarta: Menteri Pendidikan Nasional.
- Sudibyo, B. 2009b. *Rencana Strategis Depatertem Pendidikan Nasional Tahun 2010–2014* (online). (<http://www.isi-dps.ac.id/wp-content/uploads/downloads/2010/02/Renstra-Depdiknas-2010-2014-status-17-sept-09-Siap-Print.pdf>), diakses 2 April 2012.
- Supriyanto. 2011. *Opini-Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal (2)*. (online). (<http://tabloid-mh.blogspot.com/2010/12/opini-pendidikan-berbasis-keunggulan.html>), diakses 2 April 2012).
- Undang-Undang No. 20 Tentang Sisdiknas*. 2003. Bandung: Pokusmedia.